

Strategi Komunikasi Publik Digital dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemerintah Kota Medan

Ferry Hidayat

Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Multi Sarana Manajemen Administrasi dan Rekayasa Teknologi,
Jl. Pajak Rambe No. 92 Martubung Kec. Medan Labuhan, Kota Medan
E-mail: fery.nst@gmail.com

Article History:

Received	: 08/09/2025
Received in revised form	: 10/01/2026
Accepted	: 20/02/2026

Abstract: *The digital era has transformed the way local governments communicate with citizens and encourage public participation. This study examines the relationship between digital public communication strategies and citizen participation in local government programs in Medan City. Using a quantitative approach, data were collected from residents who had accessed government digital communication channels and analyzed to assess the influence of communication clarity, digital media use, interactivity, source credibility, and information accessibility on citizen participation. The findings indicate that digital public communication strategies have a significant influence on citizen participation. Theoretically, this study contributes to the literature on digital governance by highlighting the strategic role of public communication in strengthening participatory governance at the local level. From a policy perspective, the results suggest that local governments need to develop clear, interactive, credible, and accessible digital communication strategies to enhance citizen engagement in public programs..*

Keywords: *Digital Governance; Government Communication; Public Engagement*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pemerintah daerah berkomunikasi dengan masyarakat serta mendorong partisipasi publik. Penelitian ini menganalisis hubungan antara strategi komunikasi publik digital dan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah daerah di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data dari masyarakat yang telah mengakses kanal komunikasi digital pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik digital berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian tata kelola digital dengan menegaskan peran strategis komunikasi publik dalam memperkuat partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Dari sisi kebijakan, temuan penelitian ini menekankan pentingnya perumusan strategi komunikasi publik digital yang jelas, interaktif, kredibel, dan mudah diakses guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah daerah.

Kata kunci: Komunikasi Pemerintahan; Pelibatan Publik; Tata Kelola Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Di era digital, pemerintah daerah tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai informasi satu arah, tetapi dituntut membangun komunikasi yang interaktif, transparan, dan partisipatif melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, situs web resmi, dan aplikasi layanan publik. Strategi komunikasi publik menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena kualitas komunikasi yang dibangun pemerintah berpengaruh terhadap pemahaman kebijakan, kepercayaan publik, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah (Nurhidayat et al., 2024; Kondolele et al., 2025; Husna & Ayuh, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik berbasis digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Studi yang dilakukan (Hanisch et al., 2023; Shin et al., 2024) menegaskan bahwa pemanfaatan media digital oleh pemerintah mampu memperluas jangkauan komunikasi, meningkatkan akuntabilitas, serta membuka ruang keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik.

Temuan empiris juga menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi publik digital tidak bersifat otomatis. Di Indonesia, meskipun kanal komunikasi digital pemerintah semakin berkembang, tingkat partisipasi masyarakat masih belum optimal akibat persoalan literasi digital, kesenjangan akses teknologi, serta konsistensi dan kredibilitas pesan pemerintah (Husna & Ayuh, 2025; Rosalía & Novo, 2014; Jho & Song, 2015).

Literatur mutakhir menekankan bahwa kualitas strategi komunikasi publik lebih menentukan dibandingkan sekadar keberadaan inovasi digital. Kredibilitas aktor komunikasi, kejelasan pesan, serta interaktivitas komunikasi terbukti berperan penting dalam membangun kepercayaan dan mendorong keterlibatan publik (Kondolele et al., 2025; Tufekci et al., 2025).

Penelitian (Nurhidayat et al., 2024) melalui *e-participation Index* di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam *e-government* cenderung meningkat, tetapi belum substantif karena keterbatasan regulasi, kesenjangan digital, dan rendahnya kepercayaan publik. Hal ini mengindikasikan

adanya kesenjangan antara potensi komunikasi publik digital dan realitas praktik partisipasi masyarakat.

Temuan tersebut, studi pada level lokal dan sektoral memperlihatkan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan implementasi. Penelitian (Indarti et al 2024) menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik belum sepenuhnya optimal karena kendala teknis dan keterbatasan akses layanan.

Kajian mengenai transparansi dan responsibilitas pelayanan publik menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan akuntabilitas aparatur merupakan prasyarat penting bagi tumbuhnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat (Dwi et al., 2020). Penelitian lain dalam konteks inovasi pelayanan publik dan *good governance* juga menegaskan bahwa partisipasi merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, bersama dengan transparansi dan akuntabilitas (Wirasanti & Darmi, 2024).

Meski demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada evaluasi program atau efektivitas layanan tertentu, seperti pelayanan administrasi kependudukan atau inovasi layanan berbasis aplikasi, dengan pendekatan kualitatif dan kontekstual (Ascarya & Hertati, 2024 ; Hidayah et al., 2025). Kajian yang secara khusus mengintegrasikan dimensi strategi komunikasi publik digital dengan tingkat partisipasi masyarakat melalui pendekatan kuantitatif, khususnya pada level pemerintah kota besar di luar Pulau Jawa, masih relatif terbatas.

Research gap penelitian ini terletak pada belum banyaknya studi yang menguji secara empiris pengaruh strategi komunikasi publik digital pada partisipasi masyarakat dalam kerangka tata kelola digital pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi komunikasi publik digital Pemerintah Kota Medan terhadap partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah daerah.

Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana strategi komunikasi publik digital yang dijalankan Pemerintah Kota Medan, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah daerah, serta sejauh

mana strategi komunikasi publik digital berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi komunikasi publik digital Pemerintah Kota Medan terhadap partisipasi masyarakat, dengan hipotesis bahwa dimensi kejelasan informasi, pemanfaatan media digital, interaktivitas, kredibilitas sumber, serta aksesibilitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat, baik secara parsial maupun simultan.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian komunikasi publik dan digital governance, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi komunikasi publik yang lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan keterlibatan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori (Hidayat, 2025) yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara strategi komunikasi publik digital dan partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah daerah. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh strategi komunikasi publik terhadap tingkat partisipasi masyarakat Kota Medan di era digital.

Subjek penelitian adalah masyarakat Kota Medan yang telah terpapar informasi program pemerintah daerah melalui kanal komunikasi digital. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria responden berusia di atas 17 tahun, berdomisili di Kota Medan, dan pernah mengakses informasi digital pemerintah. Teknik ini dipilih karena hanya responden yang memiliki pengalaman paparan komunikasi publik digital yang relevan untuk mengukur pengaruh strategi komunikasi publik terhadap partisipasi masyarakat serta menghindari bias pengukuran.

Jumlah sampel penelitian sebanyak 150 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 8%, yang dinilai memadai untuk analisis PLS-SEM. Responden ditetapkan secara proporsional untuk menjaga keragaman karakteristik berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Namun, penggunaan

purposive sampling berpotensi menimbulkan bias karena dominasi responden yang lebih melek digital, sehingga hasil penelitian ini tidak digeneralisasikan secara penuh, melainkan menjelaskan hubungan antarvariabel pada kelompok masyarakat yang telah terpapar komunikasi publik digital pemerintah daerah.

Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Variabel independen adalah strategi komunikasi publik digital yang dioperasionalkan ke dalam lima dimensi, yaitu kejelasan informasi, media komunikasi digital, partisipasi dan interaktivitas, kredibilitas sumber informasi, aksesibilitas dan keterjangkauan. Variabel dependen adalah partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah daerah, yang diukur melalui partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi program.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring dan luring terbatas untuk menjangkau responden dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Selain itu, wawancara singkat dilakukan pada sebagian responden sebagai data pendukung untuk memperkuat interpretasi hasil kuantitatif. Data wawancara tidak dianalisis sebagai temuan terpisah, melainkan digunakan untuk memberikan konteks empiris terhadap hasil analisis kuantitatif, khususnya terkait persepsi responden terhadap kejelasan informasi, interaktivitas, dan kredibilitas komunikasi publik digital pemerintah.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik PLS-SEM melalui perangkat lunak SmartPLS. Tahapan analisis meliputi evaluasi model pengukuran (outer model) untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk, serta evaluasi model struktural (inner model) untuk menguji pengaruh strategi komunikasi publik digital terhadap partisipasi masyarakat. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan memperhatikan nilai koefisien jalur, t-statistic, dan p-value.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

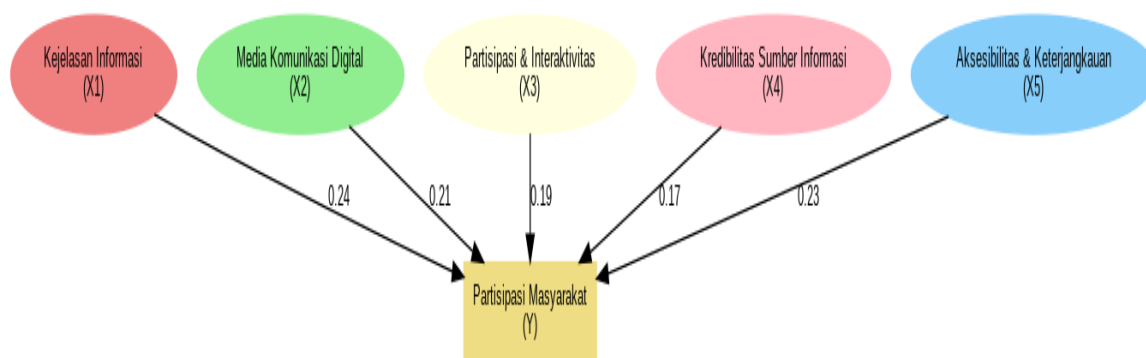
1. Evaluasi Outer Model

Hasil pengujian outer model menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nilai loading factor berada di atas 0,70, nilai AVE melebihi 0,50, serta nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha seluruh konstruk berada di atas batas minimum yang disyaratkan. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel untuk mengukur konstruk strategi komunikasi publik dan partisipasi masyarakat.

2. Evaluasi Inner Model

Hasil evaluasi inner model menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik digital memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan partisipasi masyarakat. Nilai R^2 sebesar 0,62 mengindikasikan bahwa 62% variasi partisipasi masyarakat dapat dijelaskan oleh strategi komunikasi publik, sedangkan nilai Q^2 sebesar 0,41 menunjukkan bahwa model memiliki daya prediksi yang baik.

3. Hasil Uji Hipotesis



Gambar 1. Hasil uji path coefficient

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kejelasan informasi (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat, dengan koefisien sebesar 0,24, nilai $t = 3,12$, dan $p < 0,01$. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin jelas informasi yang disampaikan pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah daerah. Selanjutnya, media komunikasi digital (X_2) juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat, dengan koefisien 0,21, nilai $t = 2,87$,

dan $p < 0,01$, yang menegaskan bahwa pemanfaatan kanal digital mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Hasil serupa juga terlihat pada variabel partisipasi dan interaktivitas publik (X_3), dengan koefisien sebesar 0,19, nilai $t = 2,45$, dan $p = 0,014$, yang menunjukkan bahwa interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi. Kredibilitas sumber informasi (X_4) turut berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dengan koefisien 0,17, nilai $t = 2,10$, dan $p = 0,036$. Hal ini berarti bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah sebagai penyampai informasi akan menentukan tinggi rendahnya partisipasi mereka.

Selain itu, aksesibilitas dan keterjangkauan informasi (X_5) juga memberikan pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,23, nilai $t = 3,04$, dan $p < 0,01$. Hal ini menegaskan bahwa semakin mudah informasi pemerintah diakses masyarakat, semakin besar pula peluang partisipasi mereka. Secara simultan, kelima sub-variabel strategi komunikasi publik (X_1 – X_5) terbukti berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dengan kontribusi R^2 sebesar 0,62, yang berarti model ini mampu menjelaskan 62% variasi partisipasi masyarakat, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini.

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik yang dijalankan Pemerintah Kota Medan melalui berbagai kanal digital berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Temuan ini menegaskan kembali argumen dalam pendahuluan bahwa komunikasi publik di era digital bukan sekadar sarana penyampaian informasi, melainkan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam pembangunan daerah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak semata-mata dipengaruhi oleh ketersediaan media digital, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas strategi komunikasi publik yang diterapkan pemerintah. Kejelasan informasi, tingkat interaktivitas, serta kredibilitas sumber informasi muncul sebagai faktor kunci yang memperkuat relasi antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi publik di era digital tidak lagi

berfungsi sekadar sebagai sarana teknis penyampaian informasi, melainkan sebagai mekanisme tata kelola yang membentuk kepercayaan, legitimasi kebijakan, dan keterlibatan warga dalam proses pemerintahan (Nurhidayat et al., 2024);(Kondolele et al., 2025). Berbeda dengan pendekatan komunikasi satu arah yang bersifat informatif, strategi komunikasi publik yang interaktif dan kredibel mendorong masyarakat untuk terlibat secara lebih substantif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemerintah. Hal ini sejalan dengan temuan (Hanisch et al., 2023) dan (Tufekci et al., 2025) yang menekankan bahwa komunikasi dua arah merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya partisipasi publik yang bermakna dalam konteks pemerintahan digital.

Secara teoretis, temuan penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi publik dan digital governance dengan menegaskan bahwa efektivitas komunikasi pemerintah tidak ditentukan oleh intensitas penggunaan media digital semata, melainkan oleh integrasi kualitas pesan, interaktivitas, kredibilitas, serta aksesibilitas informasi. Hasil ini memperluas literatur komunikasi pemerintahan dengan menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik digital berperan sebagai determinan struktural partisipasi masyarakat pada level pemerintah daerah, khususnya dalam konteks perkotaan di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pendekatan participatory governance yang memosisikan komunikasi publik sebagai instrumen strategis dalam membangun relasi kepercayaan antara pemerintah dan warga serta dalam mendorong keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui perluasan kanal komunikasi digital, tetapi memerlukan perancangan strategi komunikasi publik yang terencana, konsisten, dan berorientasi pada keterlibatan warga. Pemerintah Kota Medan perlu memastikan bahwa setiap informasi kebijakan disampaikan secara jelas dan kredibel, sekaligus menyediakan ruang interaksi yang responsif agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan umpan balik secara aktif.

Selain itu, perhatian terhadap aspek inklusivitas menjadi penting dengan memastikan akses informasi yang mudah bagi seluruh kelompok masyarakat,

termasuk kelompok rentan yang menghadapi keterbatasan literasi digital dan akses teknologi. Penguatan kapasitas aparatur sebagai komunikator publik digital juga diperlukan agar komunikasi pemerintah tidak bersifat simbolik, melainkan benar-benar mampu mendorong partisipasi masyarakat yang substantif dalam pembangunan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik digital berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat pada konteks Pemerintah Kota Medan. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi publik yang mencakup kejelasan informasi, pemanfaatan media digital, interaktivitas, kredibilitas sumber, dan aksesibilitas informasi. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi publik digital tidak sekadar berfungsi sebagai saluran teknis, melainkan sebagai mekanisme tata kelola yang membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat. Secara empiris, strategi komunikasi publik digital mampu menjelaskan 62% variasi partisipasi masyarakat, dengan batasan pada kelompok masyarakat yang telah terpapar komunikasi publik digital pemerintah daerah.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian komunikasi publik dan digital governance dengan menegaskan bahwa kualitas strategi komunikasi publik, terutama kejelasan pesan, interaktivitas, dan kredibilitas, merupakan determinan struktural partisipasi masyarakat pada level pemerintah daerah. Temuan ini memperkuat pendekatan participatory governance yang memosisikan komunikasi publik sebagai instrumen kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berorientasi pada masyarakat.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, Pemerintah Kota Medan disarankan untuk mengembangkan strategi komunikasi publik digital yang tidak hanya berfokus pada perluasan kanal komunikasi, tetapi terutama pada peningkatan kualitas komunikasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap informasi kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami agar tidak

menimbulkan ambiguitas yang dapat menghambat partisipasi masyarakat. Selain itu, penguatan interaktivitas melalui mekanisme komunikasi dua arah, seperti forum konsultasi daring, kanal umpan balik digital, dan layanan pengaduan yang responsif, menjadi penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih substantif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemerintah.

Pemerintah daerah juga perlu menjaga dan memperkuat kredibilitas sebagai sumber informasi publik dengan menjamin transparansi, akurasi data, serta konsistensi pesan lintas platform digital. Upaya peningkatan aksesibilitas informasi harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang menghadapi keterbatasan literasi digital dan akses teknologi, melalui penyediaan berbagai format informasi dan kombinasi kanal digital serta non-digital. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur sebagai komunikator publik digital perlu menjadi perhatian agar komunikasi pemerintah tidak bersifat simbolik, melainkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen tata kelola yang partisipatif.

Bagi pengembangan akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas model dengan memasukkan variabel lain, seperti literasi digital, kepercayaan institusional, dan faktor sosio-kultural, yang berpotensi memengaruhi partisipasi masyarakat. Studi komparatif antar daerah atau penggunaan pendekatan metodologis campuran juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran strategi komunikasi publik digital dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah yang beragam.

DAFTAR RUJUKAN

- Ascarya, P. G., & Hertati, D. (2024). The Effectiveness of the Proactive Service Program (Jemput Bola Terpadu) as an Effort to Accelerate Services by the Population and Civil Registration Office of Sidoarjo Regency Padma. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik*, 6(September), 116–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.36085/jmpkp.v6i2.6003>
- Dwi, A., Indarti, S., & Patrisia, N. E. (2020). Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik (Sebuah Kajian Ilmu Administrasi). *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v7i1.1091>
- Hanisch, M., Goldsby, C. M., Fabian, N. E., & Oehmichen, J. (2023). Digital governance: A conceptual framework and research agenda. *Journal of*

- Business Research*, 162(July 2022), 113777.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113777>
- Hidayah, B. N., Suherman, A., & Rantau, M. I. (2025). Inovasi Pelayanan Publik pada Aplikasi Silacak (Sistem Informasi Lacak Armada) dalam Upaya Peningkatan Layanan Pengangkutan Sampah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik*, 7. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v7i1.7012>
- Hidayat, F. (2025). *Metodologi Penelitian Administrasi Manajemen & Akuntansi*. Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Multi Sarana Manajemen Administrasi dan Rekayasa Teknologi.
https://www.researchgate.net/publication/397520882_Metodologi_Penelitian_Administrasi_Manajemen_Akuntansi/link/6913e20e9708d52f2da738db/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7InBhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlvbilInByZXZpb3VzUGFnZSI6bnVsbH19
- Husna, S. N., & Ayuh, E. T. (2025). Studi Tentang Strategi Komunikasi Publik Kominfo Kota Bengkulu dalam Mendorong Literasi di Masa Transformasi Digital. *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3).
<https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1074>
- Indarti, S., Andriadi, M., & Rosidin. (2024). Evaluation of Electronic-based Population Administration Services Policy at the Population and Civil Registration Office of Bengkulu City. *Journal of Social Science and Humanities*, 3(1), 15–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58222/jossh.v3i1.869>
- Jho, W., & Song, K. J. (2015). Institutional and technological determinants of civil e-Participation: Solo or duet? *Government Information Quarterly*, 32(4).
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.09.003>
- Kondolele, S., Sultan, M. I., Akbar, M., & Putr, B. A. (2025). The nexus between public communication and policy implementation revisited: insights from the Population and Civil Registration Service of South Sulawesi, Indonesia. *Frontiers in Communication*. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1556747>
- Nurhidayat, D., Nurmandi, A., & Congge, U. (2024). Bridging the digital divide: analyzing public participation in Indonesia's e-government through the e-participation index. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2).
<https://doi.org/10.26618/ojip.v14i2.14435>
- Rosalía, M., & Novo, A. (2014). An empirical analysis of e-participation . The role of social networks and e-government over citizens ' online engagement. *Government Information Quarterly*, 31(3), 379–387.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.12.006>
- Shin, B., Floch, J., Rask, M., Bæck, P., Edgar, C., Berditchevskaia, A., Measure, P., & Branlat, M. (2024). A systematic analysis of digital tools for citizen participation. *Government Information Quarterly*, 41(3), 101954.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101954>
- Tufekci, Z., Coleman, S., & Samuel, A. hertiage. (2025). Evaluating the Role of Social Media Platforms in Strengthening Citizen Engagement and Transparency in Local Government Administration. *WJAETS*.
<https://doi.org/10.30574/wjaets>
- Wirasanti, N., & Darmi, T. (2024). The Village Head's Efforts in Realizing Good Governance in Tambak Rejo Village, North Bengkulu Regencya. *Jurnal*

Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik, 6(September), 104–115.
<https://doi.org/10.36085/jmpkp.v6i2.5111>